

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis & Perkembangan Pemikiran*, FH. Unlam Press, Banjarmasin.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Haynes, Alison, 1997, *Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta.
- K, Soekarno, 1992, *Dasar – Dasar Manajemen*, Penerbit Miswar, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Meliala, A.Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung.
- Nasution, Az, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1989, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung.
- Sibadolak, Janus, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Medan.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemardjono, Maria W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitjo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Ali Mansyur dan Irsan Rahman, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2015.

Penelitian Hukum/Skripsi/Makalah

Ramadhani, Putri Indah, 2021, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Kualitas dan Keaslian Produk Kosmetik Kontainer (Share in jar) Serta Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Menangani Peredaran Kosmetik Kontainer di Kota Semarang*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rani, Ni Nyoman dan I Made Maharta, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share in jar)*, Makalah, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Sandy, Dio Aulia, 2017, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Jamu Tradisional yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet

BPOM, “Sasaran Strategis”, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>, diakses 25 Desember 2021.

BBPOM Yogyakarta, “Struktur Organisasi”, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/357-judul-struktur-organisasi.html>, diakses 25 Desember 2021.

BBPOM Yogyakarta, “Wilayah Kerja”, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/359-judul-wilayah-kerja.html>, diakses 25 Desember 2021.

Muhammad Fatoni, “BBPOM Yogyakarta : Hati-hati Memilih dan Membeli Produk Kosmetik”, <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/22/bbpom-yogyakarta-hati-hati-memilih-dan-membeli-produk-kosmetik?page=2>, diakses 13 September 2021.

PT.LIPWIH SYNERGYLAB, “Indonesia Pasar Potensial Produk Kosmetik”, <https://www.lwsynergylab.com/Berita/indonesia-pasar-potensial-produk-kosmetik.html>, diakses pada 13 September 2021.

Sella Panduarsa Garetta, “Kemenperin: Industri kosmetik tumbuh signifikan pada 2020”, <https://www.antaranews.com/berita/2003853/kemenperin-industri-kosmetik-tumbuh-signifikan-pada-2020>, diakses pada 13 September 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 045/C/SK/1977.

Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Peraturan Kepala BPOM RI No. 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar.

Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik.

Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen No.: PO.01.04.42.4082 tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Penilaian Kosmetik.